

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis penguasaan hak atas tanah dan bangunan yang berada di garis sempadan sungai, mendeskripsikan dan menganalisis kelemahan-kelemahan perlindungan hukumnya serta merekomendasi rekonstruksi perlindungan hukum yang harus dilakukan oleh Pemerintah kepada warga masyarakat yang berbasis nilai keadilan. Paradigma yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktisme, pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah *socio-legal*, dan model analisis dilakukan secara interaktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan : 1) Bahwa penguasaan hak atas tanah dan bangunan oleh warga yang berada di sepanjang garis sempadan sungai Kapuas di Kota Pontianak belum mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang diamanatkan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, UUPA, dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Perlindungan yang dirasakan oleh pemilik hak atas tanah dan bangunan hingga saat ini adalah sebatas *status quo*. 2) Kelemahan-kelemahan perlindungan hukum penguasaan hak atas tanah dan bangunan kepada warga yang bermukim di sepanjang tepian sungai Kapuas di Kota Pontianak adalah terbentur oleh substansi hukum tentang garis sempadan sungai. Struktur hukum, Pemerintah Kota Pontianak, BPN maupun Dinas Cipta Karya terpaku pada UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 28/PRT/2015 tentang GSS dan GSD, Peraturan Walikota Pontianak No. 95 Tahun 2005 tentang GSS Dalam Wilayah Kota Pontianak, Perda No. 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pontianak Tahun 2013-2033. Budaya hukum masyarakat yang sangat menghormati tradisi bermukim di tepian sungai. 3) Rekonstruksi nilai ideal perlindungan hukum penguasaan hak atas tanah dan bangunan di sempadan sungai Kapuas berbasis nilai keadilan adalah dengan penguatan fungsi pemerintah untuk melindungi pemilik tanah dan bangunan di sempadan sungai Kapuas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pemilik tanah. Rekonstruksi hukum terhadap Pasal 3 ayat (3) UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Pasal 17 ayat (1) PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Pasal 26 (c) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 28/PRT/2015 tentang Penetapan GSS Dan GSD, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Pontianak No. 95 Tahun 2005 tentang GSS Dalam Wilayah Kota Pontianak, Pasal 18 ayat (2) Perda No. 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pontianak Tahun 2013-2033, dan tumbuhnya sikap warga masyarakat yang peduli dan bertanggungjawab melaksanakan aturan hukum, sehingga kehidupan lebih tertata, tertib, dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian sungai.

Kata Kunci : Garis Sempadan Sungai, Perlindungan Hukum, Nilai Keadilan.

ABSTRACT

This study intend to find and analyze the tenure rights of land and buildings in the riparian zone, describe and analyze the weaknesses of its legal protection as well as recommending the reconstruction of legal protection that must be done by the City government to citizens based on values of justice. This study using the constructivism paradigm, the approach chosen in this study is a socio-legal, and analysis models performed interactively.

The results of this study concluded: i) The tenure of land and buildings in the riparian zone of the Kapuas in Pontianak, not yet to get justice until now and in the status quo unlimited time. ii) Weaknesses in the legal protection of the tenure of land and buildings who live in the riparian zone of the Kapuas in Pontianak was collide by some of the riparian zone regulations, officials authorized agency obey to the provisions of the laws in force, legal culture of society who revere tradition of living on the riparian zone. iii) Reconstruction of the ideal value of the legal protection of land property and buildings in the riparian zone of Kapuas based on the value of justice is to strengthen the functions of government to protect the owners of land and buildings in order to increase economic growth and welfare of the people and reconstruct the law against Article 3 paragraph (3) of the Act No. 11 of 1974 about Irrigation, Article 17 paragraph (1) government regulations No. 38 of 2011 about river, Article 26 (c) Ministry of public works and public housing No. 28 / PRT / 2015 about riparian zone and lakes, and Article 2 paragraph (1) regulations of the Mayor of Pontianak on establishment riparian zone In Pontianak City Region.

Reconstruct of land property and buildings citizens who are living in the riparian zone, it is necessary to provide legal protection to the unclear legal status of the tenure rights to land and buildings owned by residents. Accordingly, it is necessary Pontianak City Government policies that citizens who control the rights to land and buildings in the riparian zone get protection of the law that is based on values of justice.

Keywords: Riparian Zone, Protection of Law, Justice Values.